

Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah

Astari, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

astar.aril@gmail.com

Sobrotul Imtikhanah, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Muh. Fithrayudi T. , Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Received	Revised	Accepted	Published
18 November 2024	01 December 2024	11 March 2025	11 March 2025

Abstrak

Indonesia, dengan 38 provinsinya, memerlukan pengawasan dan regulasi yang signifikan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi menawarkan solusi untuk mengelola banyaknya pemerintahan daerah, dengan tujuan memberdayakan daerah dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh negeri. Meskipun desentralisasi telah berjalan hampir satu dekade, daerah-daerah tetap bergantung secara finansial pada pemerintah pusat. Studi ini meneliti *flypaper effect* sebagai indikator keberhasilan desentralisasi, dengan fokus pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, khususnya wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan dari tahun 2018-2023. Penelitian ini mengevaluasi (1) pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, (2) mana yang memiliki pengaruh lebih besar, (3) keberadaan *flypaper effect*, dan (4) apakah efek tersebut bervariasi dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis kuantitatif, sehingga data disajikan dalam bentuk angka atau dapat diukur. Temuan menunjukkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut mempengaruhi belanja daerah dan *flypaper effect* terjadi di Jawa Tengah dari tahun 2018-2023, bahkan di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi.

Kata Kunci: *Flypaper Effect, Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah*

Abstract

Indonesia, with its 38 provinces, requires significant oversight and regulation by the central government. Decentralization offers a solution for managing the numerous local governments, aiming to empower regions and ensure equitable development across the country. Although decentralization has been in place for nearly a decade, regions remain financially dependent on the central government. This study examines the *flypaper effect* as an indicator of decentralization success, focusing on districts and cities in Central Java

How To Cite

Astari, Imtikhanah, S.; Futhrayudi, M.T. Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah. (2025). MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 5(1), 45-58. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1411>

Copyright

©2025 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Province, particularly the Eks-Karesidenan Pekalongan region from 2018-2023. The research evaluates (1) the impact of General Allocation Funds and Regional Revenue on Local Expenditure, (2) which has a greater influence, (3) the existence of the flypaper effect, and (4) whether this effect varies with the level of Regional Revenue. This study is descriptive and employs quantitative analysis, presenting data in measurable or numerical form. The findings indicate that both revenue sources affect local expenditure and that the flypaper effect occurred in Central Java from 2018-2023, even in regions with high Regional Revenue.

Keywords: *Flypaper Effect, Decentralization, Regionally Original Income, General Allocation Fund, Regional Expenditure*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau dengan banyak provinsi. Karena luasnya wilayah dan banyaknya provinsi, pemerintah pusat menghadapi beban dalam mengelola negara ini. Selain itu, banyak masalah terkait pemerintahan negara yang muncul dari tuntutan berbagai daerah terhadap kontribusi mereka kepada pemerintah pusat. Situasi ini mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah, yang melibatkan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Pelimpahan kekuasaan ini disertai dengan tanggung jawab terkait pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam mengatur daerah mereka secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat (Suparto, 2017).

Dengan adanya otonomi daerah, paradigma sistem pemerintahan bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi. Sistem desentralisasi memungkinkan daerah membentuk wilayah otonom yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Tujuan utama pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam hal pembangunan dan penyediaan layanan publik, serta memperkuat persatuan politik dan nasional (Faisal; Nasution, 2016).

Desentralisasi tidak hanya terbatas pada negara kesatuan atau federal; di negara kesatuan, ada satu kekuasaan yang dibagi kepada pemerintah daerah, yang bisa dipahami sebagai hubungan *top-down* di mana satu kekuasaan tunggal dibagi di antara daerah-daerah bawahannya. Sebaliknya, negara federal terdiri dari wilayah-wilayah berdaulat yang bersatu. Desentralisasi sendiri mencakup berbagai bentuk dan dimensi, terutama yang berkaitan dengan sistem fiskal, politik, administrasi, serta pembangunan sosial dan ekonomi (Yustika & Erani, 2008)

Dalam buku mereka, Hartmann & Crawford (2015) menjelaskan bahwa "*Decentralization entails the transfer of power, responsibilities, and finance from central government to sub-national levels of government at provincial and or local levels*". Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang mencakup tiga aspek: kekuasaan, tanggung jawab, dan dana. Taufiq (2010) menyatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian besar: desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal, yang semuanya saling terkait dan sebaiknya diimplementasikan bersama-sama untuk mencapai berbagai tujuan otonomi daerah, seperti peningkatan pelayanan publik.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, momen ini menandai pergeseran dalam tata kelola negara, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah di Indonesia. Otonomi daerah yang diterapkan pemerintah juga berdampak pada desentralisasi fiskal, yang mengacu pada proses alokasi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah pusat, ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah atau pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Proses ini disesuaikan dengan sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, sehingga memberikan kesempatan bagi daerah untuk memaksimalkan potensi mereka. Dengan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pengelolaan keuangan dan pendanaan pembangunan. Tujuan alokasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah untuk membantu pembiayaan kebutuhan daerah terkait dengan pelaksanaan desentralisasi.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendanaan yang signifikan ini, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberlakukan. Perimbangan keuangan ini diwujudkan melalui dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan anggaran negara yang dialokasikan ke setiap daerah untuk mendorong pelaksanaan desentralisasi secara praktis. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan lokal. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya sendiri dalam praktik pemerintahan. Dana Bagi Hasil berperan dalam menyeimbangkan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pendapatan pajak yang dibagikan. DAU berfungsi sebagai sarana pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia. DAK berfungsi sebagai dana yang mendukung inisiatif kebijakan darurat (Saragih & Panglima, 2003)

Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah. DAU bertujuan untuk meratakan kinerja fiskal daerah dengan menerapkan perhitungan yang mempertimbangkan kebutuhan belanja, kebutuhan anggaran, dan potensi daerah. Selain berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk pemerataan pendapatan di seluruh pemerintah daerah, alokasi DAU seharusnya idealnya digunakan sebagai alat untuk mengungkit potensi dan merangsang sumber daya ekonomi lokal guna meningkatkan PAD suatu daerah. Namun, mencapai tujuan ini masih menjadi tantangan. Pemerintah daerah menghadapi hambatan dalam mengoptimalkan potensi PAD, seperti masalah kepemilikan dan keterbatasan pengelolaan sumber daya alam yang langka, yang akhirnya menyebabkan ketergantungan pada pendanaan atau alokasi dari pemerintah pusat. Seiring waktu, penyimpangan dari tujuan awal transfer daerah semakin sering terjadi dalam upaya mengurangi kesenjangan anggaran antar daerah. Hal ini terlihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana proporsi DAU tetap cukup besar dan relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah PAD atau pendapatan sah daerah lainnya.

Di sisi lain, belanja daerah selalu menjadi sorotan publik. Sebagai pihak yang berkontribusi terhadap dana publik melalui pembayaran pajak daerah, masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik, efisien, efektif, dan sesuai dengan kepentingan publik. Menurut F Simanjuntak dkk. (2013), belanja daerah mencakup biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan untuk menangani aspek tertentu yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah maupun pusat, atau keduanya.

Oleh karena itu, pembangunan daerah harus komprehensif dan terkoordinasi agar setiap wilayah dapat berkembang sesuai dengan prioritas dan potensinya. Pemerintah daerah berlomba-lomba dalam upaya pembangunan dengan merancang strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengalokasikan dana tersebut ke sektor ekonomi. Karena PAD dimiliki langsung oleh pemerintah daerah dan mereka memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dana tersebut untuk tujuan pembangunan, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 20 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam definisi lainnya, pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi, badan usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber sah lainnya dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2018).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, PAD menjadi elemen yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. PAD yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut lebih mandiri secara finansial, yang berarti tidak perlu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau daerah lainnya. Peningkatan PAD menunjukkan seberapa baik daerah tersebut mengelola sumber pendapatan lokal. Namun, jika PAD digunakan secara berlebihan, hal ini dapat menambah beban bagi masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus disertai dengan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan yang mendukung pembangunan di tingkat daerah, seperti pembangunan infrastruktur, PAD juga menunjukkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Karena PAD memainkan peran penting dalam pembiayaan daerah, kemampuan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh seberapa besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari Transfer Keuangan Daerah yang bertujuan untuk mengurangi disparitas kemampuan keuangan dan pelayanan publik antar daerah. Oleh karena itu, DAU merupakan dana tahunan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah di Indonesia. Dana ini digunakan untuk membantu pembangunan di setiap daerah, terutama di daerah yang terdesentralisasi, sesuai dengan kebutuhan mereka.

DAU, yang berfungsi sebagai pilar utama pembiayaan APBD, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran pegawai, yang mengakibatkan pengurangan anggaran yang signifikan untuk proyek pembangunan. DAU dapat diklasifikasikan sebagai transfer tanpa syarat atau *block grant*, yaitu bentuk transfer antar tingkat pemerintahan

yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. Fungsi utama dari bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Sebagai transfer tanpa syarat atau *block grant*, penggunaan DAU ditentukan oleh daerah penerima. Namun, Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Pasal 15 menyatakan bahwa penggunaan DAU bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan daerah guna memastikan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah mengacu pada semua kewajiban yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai aset bersih dalam tahun anggaran tertentu. Ini adalah tanggung jawab daerah untuk satu tahun anggaran dan tidak akan diganti oleh daerah. Belanja daerah mencakup semua tanggung jawab pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai aset bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. Tujuan belanja daerah adalah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan belanja daerah dilakukan dengan tiga pendekatan: kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, belanja daerah harus mematuhi standar harga dan analisis standar belanja.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki dampak signifikan terhadap belanja daerah dalam penyusunan APBD yang mulai diterapkan sejak tahun anggaran 2021.

Berdasarkan data dari djp.kemenkeu.go.id, terjadi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah pada kuartal pertama tahun anggaran 2018 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun anggaran 2017. Target pendapatan meningkat sebesar 3,82%, dari Rp93,732 triliun menjadi Rp97,313 triliun. Sementara itu, anggaran belanja dan transfer juga meningkat sebesar 5,06%, dari Rp97,981 triliun menjadi Rp102,934 triliun. Defisit anggaran juga meningkat, dari Rp4,249 triliun pada kuartal pertama tahun anggaran 2018 menjadi Rp5,621 triliun. Target pendapatan agregat untuk Jawa Tengah pada kuartal pertama tahun anggaran 2018 adalah Rp97,313 triliun. Pada kuartal pertama tahun anggaran 2018, realisasi pendapatan hanya mencapai 22,97%, sedikit di bawah angka sebelumnya sebesar 23,01%. Surplus juga menurun menjadi Rp11,296 triliun, menunjukkan perlunya percepatan realisasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Transfer tetap menjadi kontributor terbesar sebesar 69%, diikuti oleh PAD sebesar 26%, dan Pendapatan Sah Lainnya sebesar 5%.

Pada tahun 2020, realisasi PAD di Jawa Tengah mencapai Rp5,097 triliun, atau 17% dari target. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu Rp4,278 triliun atau 16% dari target. Meskipun terjadi peningkatan nominal, persentase realisasi terhadap target lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Meskipun demikian, elemen PAD Sah Lainnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam persentase realisasi, dari 9% dari target sebelumnya (Rp749 miliar) menjadi 17% dari target pada kuartal pertama tahun 2020 (Rp1,481 triliun). Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam mengelola pendapatan hingga kuartal pertama dapat dianggap baik. Namun, wabah yang menjadi penghalang dalam pengumpulan pendapatan pada akhir kuartal pertama menunjukkan perlunya antisipasi dan persiapan langkah-langkah berikutnya

melalui kebijakan yang komprehensif sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi secara keseluruhan.

Sementara itu, untuk dana transfer, realisasi pada kuartal pertama tahun 2020 mencapai Rp13,273 triliun, atau setara dengan 19% dari target, menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp13,973 triliun atau 20% dari target. Pendapatan Transfer menjadi kontributor terbesar, mencapai 71,9% dari Total Pendapatan Jawa Tengah. Mayoritas realisasi berasal dari jenis Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan, yang mencapai Rp12,249 triliun, yang menyumbang 92% dari Total Pendapatan Transfer.

Penelitian ini berfokus pada fenomena *flypaper effect*, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih memilih menggunakan dana perimbangan seperti DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk meningkatkan belanja, daripada memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah. Turnbull (1992) dalam Pratiwi & Paramita (2016) menjelaskan bahwa berdasarkan fenomena *flypaper effect*, dana transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih dari jumlah penerimaan transfer itu sendiri.

Flypaper effect terjadi karena ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat (Putra & Dwirandra, 2015). *Flypaper effect* ini merupakan respons terhadap fluktuasi penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Pratiwi & Paramita, 2016). *Flypaper effect* dapat diukur dengan membandingkan koefisien dari dana transfer dengan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana hasil uji Maimunah (2006) dalam Melda & Syofyan (2020). Istilah *flypaper effect* muncul karena perbedaan dengan teori bantuan pemerintah bersyarat, yang menyatakan bahwa peningkatan transfer dari pemerintah pusat memang meningkatkan belanja untuk konsumsi barang publik, tetapi tidak menggantikan peran pajak daerah (Kurnia, 2013).

Flypaper Effect merujuk pada fenomena di mana hibah pemerintah atau dana transfer menyebabkan pemerintah daerah meningkatkan belanja mereka lebih dari pendapatan mereka sendiri (Serbes & Çetinkaya, 2022). Karakteristik *flypaper effect* umumnya dapat diidentifikasi sebagai kondisi di mana pembiayaan konsumsi atau belanja modal pemerintah daerah cenderung lebih tinggi ketika menggunakan dana transfer dibandingkan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian mereka, Serbes & Çetinkaya (2022) menjelaskan bahwa hubungan ini telah diuji dalam berbagai studi di Turki, yang menyimpulkan bahwa dampak peningkatan belanja dari dana transfer yang berasal dari pendapatan pajak anggaran umum Turki lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan di Turki sendiri.

Selain di Turki, *flypaper effect* juga telah dipelajari di beberapa negara lain, seperti Polandia dan Indonesia, di mana dampak transfer antarpemerintah terhadap belanja infrastruktur telah dianalisis. Studi-studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara subsidi pemerintah dan belanja pemerintah daerah, serta mengungkapkan kompleksitas desentralisasi fiskal dan hubungan fiskal antarpemerintah. Maimunah (2006) dalam Adiputra (2014) menyatakan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi ketika pemerintah daerah cenderung meningkatkan belanja mereka menggunakan dana transfer (hibah) yang dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU), daripada mengandalkan kekuatan keuangan mereka sendiri, yang diwakili oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pemaparan fenomena serta argumentasi, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian, yaitu (1) Apakah DAU dan PAD mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah?; (2) Bagaimana pengaruh PAD dan DAU terhadap

belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah?; (3) Apakah *flypaper effect* terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2023?; (4) Apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan PAD tinggi atau rendah.

Penelitian mengenai fenomena *flypaper effect* telah banyak ditinjau baik di dalam maupun di luar negeri. Misalnya, studi yang dilakukan oleh F Simanjuntak dkk. (2013) menemukan bahwa baik DAU maupun PAD secara bersamaan memengaruhi belanja daerah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Jumlah DAU dan PAD yang lebih tinggi memiliki dampak lebih besar terhadap belanja daerah di kabupaten/kota tersebut, tetapi DAU yang lebih rendah tidak mempengaruhi keseluruhan belanja daerah. Hasil studi menunjukkan bahwa *flypaper effect* tidak mempengaruhi DAU dan PAD untuk belanja daerah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan, baik pada tingkat yang tinggi maupun rendah.

Ginting (2019) melakukan penelitian berjudul "Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara." Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum, sementara variabel dependen adalah belanja daerah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan fokus pada kabupaten/kota di Sumatera Utara, di mana ukuran sampel sama dengan ukuran populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *flypaper effect* terjadi pada ketiga model yang digunakan: belanja publik total, belanja di sektor pendidikan, dan belanja di sektor kesehatan. Ini berarti bahwa peningkatan dana alokasi umum akan menyebabkan peningkatan belanja publik total, belanja di sektor pendidikan, dan belanja di sektor kesehatan.

Ikhwani dkk. (2019) melakukan penelitian berjudul "*Flypaper Effect* pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh." Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah, sedangkan variabel independen meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini fokus pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun 2013 hingga 2018, menggunakan analisis regresi linear berganda. Ukuran sampel sama dengan ukuran populasi untuk penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa *flypaper effect* terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Melda & Syofyan (2020) melakukan penelitian berjudul "Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat." Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan belanja daerah merupakan variabel dependen. Penelitian ini mencakup 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2015 hingga 2018, dengan ukuran sampel yang mencakup seluruh populasi studi. Analisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koefisien dana transfer lebih tinggi dibandingkan koefisien Pendapatan Asli Daerah, yang menunjukkan adanya *flypaper effect* di kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Wati dkk. (2022) melakukan analisis berjudul "*The Flypaper Effect Phenomenon of Intergovernmental Transfers During the Covid-19: Evidence from Indonesia*". Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah, sedangkan variabel

independennya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), pembiayaan pemerintah daerah, dan Covid-19 sebagai variabel independen dan moderasi. Penelitian ini menggunakan *Moderating Regression Analysis*. Data yang digunakan merupakan data aktual dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indonesia tahun 2019 dan 2020, melibatkan 531 pemerintah daerah, termasuk kabupaten, kota, dan provinsi. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Menurut penelitian ini, terdapat fenomena *flypaper effect* yang mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan DAU daripada PAD untuk belanja mereka. Fenomena *flypaper effect* ini menyebabkan peningkatan belanja pemerintah daerah pada DAU dan PAD selama pandemi Covid-19.

Kustianingsih dkk. (2022) melakukan penelitian berjudul "*Flypaper Effect on Regional Original Revenue and General Allocation Funds on Regional Expenditure in East Java Province*". Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan variabel independen dalam penelitian ini, dengan belanja daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Studi ini berfokus pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan data realisasi APBD (PAD, DAU, dan belanja daerah) dari tahun 2019 hingga 2020. Dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur, sampel terdiri dari 28 kabupaten dan 9 kota yang memiliki data PAD, DAU, dan Belanja Daerah dari tahun 2019 hingga 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Pengujian tambahan mengungkapkan bahwa *flypaper effect* terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Isik et al. (2023), *flypaper effect* terjadi baik di Nigeria maupun Afrika Selatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Studi tersebut menemukan bahwa *flypaper effect* secara signifikan lebih besar pada pemerintah provinsi di Afrika Selatan dibandingkan dengan pemerintah negara bagian di Nigeria.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan diatas, maka kebaruan penelitian pertama adalah variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya berfokus pada DAU dan PAD. Kebaruan kedua adalah penelitian ini menggunakan rentang periode yang lebih luas, yaitu pada periode 2018 - 2023 sehingga penelitian akan lebih akurat dan relevan.

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah *Agency Theory*. Menurut *Agency Theory*, PAD mencerminkan hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat, sebagai prinsipal, telah menyediakan sumber daya kepada pemerintah daerah, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan PAD. Sebagai agen, pemerintah daerah diharapkan memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan manfaat. Di sisi lain, Dana Alokasi Umum (DAU) menurut *Agency Theory* menggambarkan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja daerah untuk memenuhi semua kebutuhan layanan publik dan pembangunan daerah dalam konteks desentralisasi yang merata.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga peneliti menggunakan analisis kuantitatif, di mana data diwakili dalam satuan numerik atau dapat diukur. Statistik deskriptif dalam konteks ini menggambarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, termasuk variabel dependen dan independen. Tujuan penyajian statistik deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai data terkait

variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah (BD). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs web Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Data yang dianalisis berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018 hingga 2023. Penelitian ini melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, sebagai populasi. Wilayah eks-Karesidenan Pekalongan digunakan sebagai sampel penelitian ini.

Temuan dan Analisis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat berdasarkan perubahan nilai variabel bebas. Analisis ini juga menentukan apakah terdapat hubungan positif atau negatif antara variabel bebas dan variabel terikat. Tabel berikut menyajikan hasil model regresi yang diolah menggunakan program IBM SPSS Statistik 26.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-128.992.523.364,962	40.223.499.666,842		-3.207	.002
PAD	.984	.031	.475	31.804	.000
DAU	2.104	.044	.709	47.425	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan *output* olah data pada tabel diatas maka didapat persamaan regresi berikut

$$Y = -128.992.523.364,962 + 0,984 X_1 + 2,104 X_2$$

Dari persamaan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) sebesar -128.992.523.364,962 menunjukkan bahwa jika variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X₁) dan Dana Alokasi Umum (X₂), bernilai 0, maka nilai Belanja Modal (Y) akan bernilai negatif sebesar -128.992.523.364,962.
- Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (X₁) adalah 0,984. Ini berarti setiap penambahan 1 Rupiah pada Pendapatan Asli Daerah (X₁) akan menyebabkan kenaikan Belanja Modal sebesar Rp 0,984, dengan asumsi variabel lain tetap.
- Koefisien regresi untuk Dana Alokasi Umum (X₂) adalah 2,104. Ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Rupiah pada Dana Alokasi Umum (X₂) akan meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp 2.104, dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian koefisien determinasi adalah untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Koefisien determinasi (R²)

menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.959	.959	145.125.443.260,745

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Adjusted R² sebesar 0,959 menunjukkan bahwa 95,9% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen (PAD dan DAU). Sebaliknya, 4,1% variasi Belanja Daerah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Signifikansi Simultan

Hasil signifikansi simultan (uji F) menentukan apakah semua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen dalam model.

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	102.426.932.025.185,40	2	51.213.466.012.592,70	2.431,63	.000 ^b
Residual	4.359.708.609.023,12	207	21.061.394.246,49		
Total	106.786.640.634.208,53	209			

Berdasarkan tabel, nilai F_{hitung} sebesar 2.431,63 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 3,04 ($2.431,63 > 3,04$). Ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2), berpengaruh positif secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Modal (Y).

Uji Statistik

Uji Statistik (Uji t) menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig. < 0,05$, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig. > 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-128.992.523.364,962	40.223.499.666,842		-3,207	.002
PAD	.984	.031	.475	31,804	.000
DAU	2.104	.044	.709	47,425	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel, diperoleh hasil sebagai berikut:

- i. Pendapatan Asli Daerah (X1) : Nilai t_{hitung} adalah 31,804, yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,971. Nilai signifikansi adalah 0,00, yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Dengan demikian, hipotesis PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah diterima.
- ii. Dana Alokasi Umum (X2) : Nilai t_{hitung} adalah 47,425, yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,971. Nilai signifikansi adalah 0,00, yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Dengan demikian, hipotesis DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah diterima.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, serta menguji fenomena *flypaper effect* di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah pada periode 2018-2023. Sampel penelitian mencakup kota dan kabupaten di wilayah bekas Kabupaten Pekalongan.

DAU (Dana Alokasi Umum) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Koefisien regresi untuk keduanya signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki dampak positif terhadap belanja daerah.

PAD dan DAU memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan DAU memberikan pengaruh yang paling besar. Hal ini didukung dengan nilai koefisien regresi PAD positif sebesar 0,984 dengan nilai t_{hitung} sebesar 31,804, yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,971 ($31,804 > 1,971$). Nilai signifikansi 0,00 juga lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Koefisien regresi DAU positif sebesar 2,104 dengan nilai t_{hitung} sebesar 47,425, yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,971 ($47,425 > 1,971$). Nilai signifikansi 0,000 juga lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengujian menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi di semua kota dan kabupaten di Jawa Tengah kecuali Kota Semarang. Ini mengindikasikan bahwa respons pemerintah daerah terhadap DAU lebih besar dibandingkan terhadap PAD dalam membiayai Belanja Daerah, yang menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada dana pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi untuk DAU adalah 2,104 dan untuk PAD adalah 0,984, keduanya signifikan secara statistik. Ini menunjukkan adanya *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara 2018 - 2023, dengan koefisien DAU yang lebih besar dari PAD, sesuai dengan kriteria *flypaper effect*.

Kota dan kabupaten di Jawa Tengah dengan PAD rendah pada periode 2018-2023 mengalami fenomena *flypaper effect*. Hal ini dibuktikan dengan pengujian *Flypaper Effect* pada daerah dengan PAD rendah maupun tinggi menunjukkan bahwa nilai *Standardized Coefficients* PAD adalah 0,475 dan DAU adalah 0,709. Karena *Standardized Coefficients* DAU lebih tinggi daripada PAD, ini mengindikasikan bahwa *Flypaper Effect* terjadi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- Adiputra, I. M. P. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan hmanika JINAH*, 3(2).
- F Simanjuntak, L. L., Subeki, A., Sasti Ferina, I., & Yusrianty, H. (2013). *Analysis of Flypaper Effect In General Allocation Fund and Regional Original Income To Regional Expenditure Of Districts and Cities In South Sumatera*.
- Faisal; Nasution, A. huda. (2016). Otonomi Daerah : Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, 206–215.
- Ginting, A. M. (2019). Analisis Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Utara. *Kajian*, 24(2), 113–130. <https://doi.org/10.1016/S0305>
- Hartmann, C., & Crawford, G. (2015). *Decentralisation in Africa: A Pathway out of Poverty and Confl ict?* <https://www.researchgate.net/publication/281593566>
- Ikhwan, N., Naz'aina, & Ratna. (2019). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 04(02), 111–123.
- Kurnia, E. D. (2013). *Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)*.
- Kustianingsih, N., Ari Wardhaningrum, O., Studi, P. S., Jember, U., & Kalimantan No, J. (2022). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*, 8(1), 58–70. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru (XIX)*. Andi Offset.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/24>
- Pratiwi, D. R., & Paramita, ratri. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia. *Jurnal Budget*, 208–234.
- Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 811–827.
- Saragih, & Panglima, J. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Serbes, H., & Çetinkaya, Ö. (2022). Sinek Kâğıdı Etkisine Farklı Bir Yaklaşım: Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Borçlanmaları Üzerinden Bir Analiz. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 20(45), 724–758. <https://doi.org/10.35408/comuybd.1056406>
- Suparto. (2017). *Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/841>
- Taufiq, A. B. (2010). *Analisis Belanja Publik Dan Penerapan Standard Costing Pada Manajemen Penganggaran Dana Alokasi Umum (Dau) Suatu Kajian Alternatif Pendekatan Transfer Fiskal*. Universitas Indonesia.
- Wati, L. N., Ispriyahadi, H., & Zakaria, D. H. (2022). The flypaper effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia. *Zbornik*

radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, 40(2), 353-373. <https://doi.org/10.18045/zbefri.2022.2.353>
Yustika, & Erani, A. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia : kajian teoritis dan realitas empiris* (01 ed.). Bayumedia.